

Laporan Bulan September 2002

1. UMUM

Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi bagi perjalanan pembangunan bangsa-bangsa di dunia. Di Indonesia, masalah kemiskinan juga bukan merupakan suatu permasalahan yang baru karena telah menjadi topik pembicaraan dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak permulaan abad 20. Pada saat itu, banyak para ahli ekonomi dari pemerintah Kolonial Belanda maupun Negara Eropa yang membahas permasalahan kemiskinan di Indonesia, seperti Boeke, D.H. Burger, Egbert de Vries, Clifford Geertz, dan beberapa nama lainnya. Namun pembicaraan dan pemikiran mereka masih terbatas pada suatu lingkup wilayah yang terbatas, yaitu pulau Jawa yang difokuskan lagi pada wilayah perdesaan. Pemerintah Kolonial Belanda juga pernah meluncurkan suatu program anti kemiskinan yang disebut dengan “politik etis”.

Pada dasarnya, masalah kemiskinan bukan hanya terkait dengan persoalan ekonomi semata namun bersifat multidimensional yang berarti berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Konsekuensinya kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan materi (*material well-being*), tetapi juga terkait dengan kesejahteraan social (*social well-being*). Dan bila kita mengkaji secara lebih dalam maka kemiskinan mempunyai beberapa dimensi, yaitu dimensi ekonomi atau material, dimensi sosial budaya, dan dimensi struktural atau politik.

Dengan mengingat pada berbagai karakteristik kemiskinan di atas maka penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan penyedia layanan publik mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Namun pemerintah mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menuntaskan masalah tersebut baik secara organisasi, manajemen maupun keuangan. Berangkat dari pemikiran ini maka pada tanggal 7 Desember 2001, Presiden Republik Indonesia membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan melalui Keppres No 124 Tahun 2001 jo. Keppres No. 8 Tahun 2002 jo. Keppres No. 34 Tahun 2002.

Dengan munculnya Komite Penanggulangan Kemiskinan ini, pemerintah ingin mengajak dan mengkoordinasikan semua unsur bangsa, mulai dari segenap jajaran Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota; pelaku lembaga keuangan dan perbankan; perguruan tinggi; hingga masyarakat madani – termasuk di dalamnya Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat/organisasi non-pemerintah (Ornop), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta Organisasi Politik (Orpol) – untuk bergerak bersatu-padu

memberantas kemiskinan. Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) merupakan forum koordinasi yang dibentuk dengan tugas pokok mengendalikan koordinasi program pembangunan secara lintaspelaku melalui lintassektoral dan lintasdaerah. Dengan adanya koordinasi lintas pelaku ini, diharapkan sasaran penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Proenas 2000-2004 dapat terwujud.

2. KEGIATAN

Dalam melaksanakan tugas, peranan, dan fungsinya Komite Penanggulangan Kemiskinan membentuk tujuh kelompok kerja, yang meliputi Pokja Perencanaan Makro, Pokja Lembaga Keuangan, Pokja Usaha Nasional, Pokja Data dan Informasi, Pokja Asistensi Program, Pokja Pendampingan, Pokja Penelitian dan Pengembangan. Ketujuh pokja ini akan melaksanakan beberapa agenda penanggulangan kemiskinan sesuai dengan cakupan bidang kerja, serta sasaran yang ingin dicapai.

Sesuai dengan agenda kerja Komite Penanggulangan Kemiskinan tahun 2002, maka pada bulan Agustus 2002 ini beberapa pokja KPK melaksanakan beberapa kegiatan dimana Pokja Dunia Usaha mempunyai agenda besar, yaitu mengkoordinasi kalangan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan. Secara rinci, kegiatan KPK Bulan Agustus 2002 termuat di dalam lampiran 1.

2.1. Kunjungan KPK ke Kab. Grobogan, Boyolali, dan Sragen

Kunjungan di laksanakan selama dua hari, yaitu mulai tanggal 11 - 12 agustus 2002. Tujuan dari kunjungan adalah untuk memantau perkembangan pembentukan Komite di daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan model penanggulangan kemiskinan.

Kabupaten Grobogan

- Program Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Grobogan diantaranya Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pemberdayaan Petani dan Nelayan (P4K), PPSE BBM dan sebagainya. Disamping itu juga banyak lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat baik yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Kecamatan (BKK) maupun lembaga keuangan mikro yang tumbuh secara swadaya di masyarakat.
- Program yang dirasakan paling sesuai dengan masyarakat adalah PPK karena partisipasi masyarakat dalam perumusan pembangunan dirasakan cukup besar. Namun begitu ada beberapa masalah yang berkaitan dengan PPK diantaranya berkaitan dengan pasca program. Oleh karena program ini bersifat keproyekan dan kemungkinan akan selesai maka perlu dipikirkan kelanjutannya.

- Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Daerah Grobogan telah merumuskan pembentukan Badan Usaha Milik Kecamatan (BUMK). Badan ini didirikan dengan tujuan untuk mengelola program-program yang assetnya masih tersebar di masyarakat. Sekedar sebagai perbandingan untuk program yang sama di Kecamatan kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta direncanakan dibentuk Yayasan yang akan memayungi pengelolaan asset. Selain itu karena program tersebut belum memiliki badan hukum maka direncanakan juga untuk membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi lembaga yang telah terbentuk yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK) agar dapat berhubungan dengan lembaga yang berbadan hukum. Untuk Kabupaten Grobogan direncanakan dipayungi dengan Peraturan Daerah (Perda). Masalah lain yang dilaporkan adalah transparansi pemberian reward untuk program PPK yang dinilai berhasil. Pelaku PPK merasa bahwa pemilihan untuk daerah PPK yang diberi reward tidak transparan sehingga menimbulkan curiga dan prasangka negatif.
- Program usaha ekonomi yang dibiayai dari program diantaranya peternakan sapi dan kambing dengan melakukan konsolidasi lahan, yaitu memelihara hewan ternak dalam satu kawasan. Selain itu ada juga usaha kerajinan dari bambu yang berupa anyam-anyaman, dan bakulan di pasar.
- Lembaga keuangan mikro yang beroperasi di Kabupaten Grobogan adalah Badan Perkreditan Rakyat yang merupakan perubahan dari Badan Kredit Kecamatan (BKK). Saat ini masih banyak BKK yang masih beroperasi dengan jaminan hukum dari Pemerintah Daerah setempat. Selain itu tumbuh juga lembaga keuangan mikro yang tumbuh dari masyarakat dengan beberapa produk dan mekanisme simpan pinjam yang menyesuaikan diri dengan pola hidup masyarakat sehari-hari.

Kabupaten Sragen

- Dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah, Pemda Kabupaten Sragen telah membentuk Dewan Ekonomi dan Kesejahteraan yang khusus mengurus masalah kemiskinan. Terhadap himbuan untuk membentuk KPK di Daerah Pemda Sragen memberikan tanggapan bahwa Pembentukan Komite beserta tugas dan fungsi pokoknya adalah otomatis tugas Pemda dan memang hal itulah yang menjadi tugas Pemerintah sehingga tidak perlu dibentuk secara eksplisit.
- Pemda Sragen mengusulkan bahwa yang harus menjadi perhatian pokok dalam penanggulangan kemiskinan adalah sektor pertanian karena sebagian orang miskin bekerja dalam sektor pertanian. Dalam beberapa kasus Pemda Sragen menerapkan gerakan berdikari yaitu memenuhi kebutuhan daerah dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Pemda menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang terkesan mengabaikan masyarakat karena tidak memberikan ruang gerak masyarakat untuk berusaha dan berpendapatan. Contoh

kasus misalnya pada pertanian tebu di Sragen. Pada saat petani panen dan kemudian tebu diolah menjadi gula sehingga hasilnya melimpah, kebijakan Pemerintah malah membebaskan impor gula sehingga produk lokal tidak laku dan harganya anjlok.

- Untuk mekanisme penyerapan dana hasil kesepakatan antara Pemerintah (KPK) dan Bank Indonesia Pemda Sragen mengusulkan bahwa penyaluran dana harus disertai dengan pendampingan. Operasional dana pendampingan disisihkan dari pendapatan bunga sebesar 1-3%, dan untuk jasa perbankan sebesar 1-3%. Menurut pengalaman Pemerintah Daerah Sragen model tersebut lebih dapat diimplementasikan dan terbukti berhasil dari pada bantuan dana dengan bunga komersial tanpa pendampingan. Pendampingan dengan melibatkan tenaga terdidik ini juga telah sedikit mengurangi masalah pengangguran.

Kabupaten Boyolali

- Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tengah mempersiapkan pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) tingkat daerah. Arah dari program Komite tersebut adalah pada pengembangan keuangan mikro (microfinance) untuk memberikan bantuan permodalan pada kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan.
- Upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan pada sektor riil karena dianggap sebagai yang harus dikembangkan dulu mengingat besarnya masyarakat yang bergerak pada sektor tersebut. Upaya tersebut diantaranya melalui pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat, pengembangan agroindustri yang dirasakan potensinya sangat besar, dan pengembangan industri rumah tangga misalnya berupa industri obat-obatan tradisional.
- Program penanggulangan kemiskinan yang dirasakan cukup baik adalah Program Pengembangan Kecamatan melalui pengelolaan unit pengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan modal masyarakat dengan mudah, murah, dan menguntungkan. Kabupaten Boyolali juga sedang mengkaji keberlanjutan dari program tersebut setelah selesai sehingga diharapkan tetap berlanjut dan menjadi milik masyarakat.

Kunjungan ini mempunyai banyak manfaat karena mampu menyerap aspirasi pemerintah dan masyarakat daerah mengenai strategi dan model-model penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Berbagai masukan ini akan semakin memperkaya referensi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat makro nasional. Sehingga mampu akan memberikan ruang gerak bagi daerah untuk berimprovisasi dan berkreasi dalam mengatasi masalah-masalah di daerahnya, khususnya masalah kemiskinan. Kunjungan ini juga mampu mendorong daerah untuk segera membentuk KPK daerah, saat ini ketiga daerah tersebut sedang dalam proses pembentukan KPK daerah.

2.2. Kunjungan KPK ke Kab. Karawang, Jawa Barat

Pada tanggal 28 Agustus 2002, Menko Kesra beserta Sekretaris KPK mengadakan kunjungan kerja. Dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Deputi VI Kesra, pejabat BI, Bappenas, Dirjen Perkotaan Kementerian Kimpraswil, Dirjen PMD Depdagri, Direktur BNI, dan BRI. Kunjungan dilakukan di Desa Pasirtalaga dan Desa Lemahabang, di kabupaten Karawang. Kegiatan ini ditujukan dalam rangka peninjauan langsung proses dari upaya penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya diwujudkan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dalam acara tersebut Menko Kesra memberikan arahan mengenai kebijakan penanggulangan yang ditetapkan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan. Beliau berpesan bahwa tugas untuk menanggulangi kemiskinan adalah pekerjaan yang mulia sambil menyitir Hadist Nabi yaitu apabila kita menjaga janda, anak yatim, orang miskin itu termasuk *fi sabilillah*, dan dijanjikan surga sebagai pahala. Acara dilanjutkan dengan Tanya jawab seputar program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karawang termasuk hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi. Acara ditutup sekitar pukul 10.00 WIB dengan melihat pameran hasil produksi dari kegiatan ekonomi kelompok-kelompok yang menerima bantuan dari PPK. Selanjutnya kunjungan dilanjutkan ke Kecamatan Lemahabang, namun menko Kesra selaku Ketua KPK tidak dapat meneruskan kunjungan karena harus kembali ke Jakarta untuk mengikuti sidang kabinet.

Profil PPK Karawang

PPK di Kabupaten Karawang dimulai pada tahun 1999/ 2000 yang merupakan tahun pertama sesuai hasil UDKP II yang meliputi lima (5) kecamatan dengan jumlah desa 42 dan total bantuan dana sebesar Rp. 4,75 triliun. Pada tahun kedua (2000/ 2001) jumlah tersebut meningkat menjadi delapan (8) kecamatan dengan jumlah desa 69 dan total dana bantuan Rp. 7,75 triliun.

Untuk tahun pertama sebagian besar dana diwujudkan dalam bentuk fisik yaitu pembuatan/ perkerasan jalan desa/ Paving block, Jembatan, saluran air, gorong-gorong, MCK, Box pembagi, SAB, Duicker plat dan talang air. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi sangat sedikit. Tahun kedua, persentase kegiatan proyek fisik sebesar 72% (Rp.5,56 triliun) dan kegiatan ekonomi sebesar 28% (Rp.2,2 triliun) dengan penerima manfaat 892 kelompok (50.257 orang).

Untuk pelestarian program PPK pada fase I dibentuk Tim pemelihara pelestarian kegiatan fisik PPK yang dibentuk pada saat Musbangdes III. Tetapi sampai saat ini belum efektif. Kecamatan yang dikunjungi:

A. Kecamatan Telagasari

Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Telagasari dimulai tahun anggaran 1999/ 2000 (tahun II secara Nasional). Dari 14 desa yang berpartisipasi hanya tujuh desa yang didanai, yaitu sebesar Rp. 1 miliar dengan presentase pembangunan sarana-prasarana 74,8% dan usaha ekonomi 25,5%. Sarana-prasarana yang dibangun meliputi pengerasan jalan desa, Duicker, dan pembuatan saluran air dengan nilai swadaya masyarakat sebesar Rp. 82.296.500,-. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi meliputi 44 kelompok dengan jumlah anggota 1.024 orang dengan jenis usaha sebagian besar pedagang kecil, tukang endul, warungan, pembuat kue/makanan dan kerajinan rumah tangga.

Pada tahun anggaran 2001/ 2002 desa yang berpartisipasi sebanyak 14 desa dan 13 desa dapat didanai oleh PPK dengan alokasi sebesar Rp. 1 miliar. Dari jumlah tersebut sebesar 72,4% diwujudkan dalam bentuk fisik dan 27,6% nya untuk kegiatan ekonomi. Pembangunan fisik meliputi jalan desa, jembatan, saluran irigasi, sarana air bersih dan gorong-gorong dengan nilai swadaya masyarakat sebesar Rp. 91.770.250,-). Sedangkan untuk kegiatan ekonomi sampai dengan bulan Juli 2002 meliputi 33 kelompok (1.159 orang) dengan jenis usaha sebagian besar adalah pedagang kecil, tukang endul, warungan, pembuat kue/warungan dan kerajinan rumah tangga.

B. Kecamatan Lemahabang

Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Lemahabang dimulai pada tahun anggaran 2001 (tahun ke III secara nasional) dengan jumlah desa yang berpartisipasi sebanyak 9 desa dengan total bantuan dana Rp. 1 miliar dari 11 desa di wilayah Kecamatan Lemahabang (2 desa sisanya mendapat P2KP). Persentase sarana-prasarana pada tahun anggaran 2001 sebesar 72,32% sedangkan untuk kegiatan ekonomi sebesar 27,68%. Pembangunan prasarana diwujudkan dalam pengerasan jalan, gorong-gorong, paving, jembatan, sarana air bersih dan MCK dengan nilai swadaya masyarakat yang terkumpul Rp. 78.858.083,-. Untuk kegiatan ekonomi penerima manfaat per juli 2002 sejumlah 71 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 1.723 orang dengan jenis usaha sebagian besar pedagang kecil, tukang endul, warungan, pembuat kue/makanan, pengrajin anyaman bilik, anyaman bakul, pembuat opak ketan dan kerajinan lainnya.

Kunjungan di Kecamatan Pasirtalaga, dilakukan di dua desa penerima program PPK, yaitu Desa Pasirtalaga dan Desa Lemahabang. Berikut profil dari kedua desa tersebut :

1. Pasirtalaga
 - a. Program PPK. PPK telah membiayai UEP kepada 3 kelompok dengan nilai pinjaman Rp.37.875.000,- rata-rata perorangannya Rp. 200.000,- jenis kegiatan usaha warung kecil, industri rumah tangga antara lain: pembuat telur asin, makanan ringan/kue/nata de coco.
 - b. Binaan BRI Cabang Karawang-Cikampek
Kredit mikro yang telah disalurkan kepada H. ling (usaha tani sawah) dan kepada Talim bin Ijan, dengan usaha industri kerupuk pisang.
 - c. Dinas Koperasi
Kredit Mikro telah disalurkan kepada PK Hidayat dan took Abdi, keduanya merupakan usaha kelontong dan Kopontren Gayatul Jihad, dengan usaha unit simpan pinjam.
2. Lemahabang

Kredit mikro yang telah diberikan oleh BNI Cabang Karawang kepada kelompok UPPKS Vionita dengan jumlah kelompok 10 kelompok, dengan pinjaman Rp. 40.000.000,- dengan jenis kegiatan usaha daur ulang limbah industri tekstil dari pabrik Texmaco dan pabrik tekstil yang ada di Tangerang dan Bogor dengan hasil produksi berupa keset, pakaian bayi, manik-manik, dan aksesoris alat rumah tangga yang telah dipasarkan ke makro dan pasar tradisional di sekitar Karawang.

2.3. Peran Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Komite Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah koordinasi dan penajaman program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan seluruh stakeholders yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi. Sesuai dengan prinsip tersebut Sekretariat KPK mengundang Dunia Usaha untuk mengajak berperan serta aktif dalam pelaksanaan program.

Guna memfasilitasi peranan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, KPK mengadakan pertemuan dengan kalangan dunia usaha, yang meliputi BUMN, Swasta Nasional dan perusahaan Multinasional. Pertemuan ini diselenggarakan pada 15 Agustus 2002 di Ruang Rapat Taskin Kantor Menko Kesra. Berikut ini adalah beberapa hal yang dibahas dan presentasi dari masing-masing undangan:

A. PT PUSRI

PT PUSRI menekankan perlunya pemihakan pada petani mengingat petani menjadi kelompok marginal terutama di Pulau Jawa mengingat kepemilikan tanah < 2 ha, dan adanya perubahan peruntukan lahan yg dahulunya perdesaan mayoritas untuk pertanian. Petani semakin terjepit

karena untuk mengolah tanah diperlukan input pertanian agar hasil pertaniannya optimal, sedangkan harga input pertanian (pupuk, bibit dlsb) sangat mahal, selain itu harga hasil produksi pertanian menjadi mahal tetapi pemerintah menetapkan harga dasar produk pertanian rendah. PT PUSRI juga telah melakukan kemitraan dengan Unit Usaha Kecil dan Koperasi (UUKK)

Usulan :

Pemerintah perlu turun tangan dalam memberikan perlindungan kepada petani agar tidak terjadi urbanisasi dari desa ke kota dan juga mengkoordinir keterlibatan perusahaan dalam menangani kemitraan.

B. PERTAMINA

Pertamina juga telah melakukan program community development dengan prioritas utama daerah 2,5-5 km dari konsesi Pertamina, DT II dan DT I dimana ada kegiatan Pertamina. Program yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan SDM dengan pelatihan, beasiswa, pembinaan dan pelatihan pemuda
2. Pembuatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
3. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal kerja, pelatihan dan pameran
4. Partisipasi dan keluarga dalam berbagai program sosial dan kemasyarakatan, seperti Persatuan Wanita Patra, BAZIS PERTAMINA, Badan Dakwah Islam, BAKOR UMKRIS, Parisada Hindu Dharma.
5. Bantuan untuk bencana alam., berupa bantuan spontanitas dalam bentuk dana dan rehabilitasi sarana umum masyarakat, sejumlah 4,468 milyar; untuk daerah dan Jakarta sebesar 54,255 milyar

Jumlah bantuan yg diberikan total 191,5 milyar, hibah 19,7 milyar dan binaan 1,97 milyar.

Usulan:

Bentuk apa yang bisa disiapkan agar sebelum diberi dana (hutang)_ masyarakat sudah siap. Pemerintah sebaiknya menyiapkan target group, bentuk kegiatan yang akan dibiayai pemerintah sehingga dirasa perlu sinkronisasi dengan program-program daerah agar tidak terjadi overlapping.

C. KEMENTERIAN BUMN

Kementrian BUMN ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan dengan membentuk BUKK (Badan Usaha Kecil dan Koperasi) yaitu dengan menyisihkan 1-3 % laba dari BUMN. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari keperdulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Saat ini BUKK sudah melaksanakan program bina lingkungan yang dananya berasal dari laba bersih perusahaan, hanya saat ini belum tersedia juklak

D. ASTRA

Saat ini ASTRA yang mempunyai visi Sejahtera bersama bangsa, telah melakukan berbagai program untuk membantu masyarakat antara lain :

1. Pendidikan
2. Kemitraan dengan masyarakat
3. Income Generating Asset
4. Bencana alam dan pengungsi
5. Fasilitas Sosisl
6. Pembinaan UKM
7. Mitra Ventura
8. Subsidi untuk Mahasiswa Politeknik

E. FREEPORT

Sebagai bagian Corporate Responsibility maka sejak tahun 70-an PT FREEPORT telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat sekitar terutama kepada yang terkena dampak limbah, land owners dan suku-suku disekitar wilayah operasi. Untuk kegiatan pertanian juga telah diadakan kerjasama dengan UGM. Kegiatan yg dilaksanakan hampir sama dengan ASTRA, dan besarnya kontribusi adalah 1% dari penghasilan kotor tahunan. Pengelolaan dana dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Irian jaya, lembaga adat dll.

Usulan:

- Perlunya Komite PK di Daerah
- Perlunya lembaga peminjam yang punya program kongkrit pinjaman, sehingga akhirnya masyarakat tergantung pada FREEPORT, karena adanya kegagalan dalam revolving fund.

F. PERUM PUKK (PENJAMINAN USAHA KECIL DAN KOPERASI)

Perum ini mempunyai usaha pokok di bidang penjaminan kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

Usulan :

Bagaimana agar UKK mudah memperoleh penjaminan, karena banyak UKK yg tidak efektif untuk membentuk usaha kecil. Selain itu bagaimana kebijakan pemerintah dalam *channel distribution*.

G. BOGASARI FLOUR MILLS

Dalam hal penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usahanya bogasari menerapkan lima strategi yaitu :

- a. Building Human Resources
 - meliputi training karyawan, banking training center, beasiswa, dll.
- b. Protecting the environment
 - meliputi kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Encouraging Good Corporate Governance
 - bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan

- d. Assessing Social Cohesion
 - kegiatan yang mengarah pada kegiatan sosial
- e. Strengthening Economies
 - kegiatan yang ditujukan untuk penguatan ekonomi masyarakat.

Usulan-usulan:

- a. harus diidentifikasi peta potensi BUMN, Usaha Nasional dll. Dalam hal penanggulangan kemiskinan.
- b. Program yang diterapkan harus mengarah pada income generating dan employment creation.
- c. Program harus diarahkan pada self employment agar sustainable.
- d. Harus ada pembagian kerja yang jelas diantara dunia usaha agar tidak terjadi tumpang tindih.

H. KADIN

Banyak persoalan yang harus dipecahkan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Upaya diarahkan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pengembangan tersebut sebaiknya dibedakan per produk karena masalah yang melingkupi berbeda. Hal yang berhasil dilakukan oleh Kadin adalah pada saat penyaluran dana 1-3% dari penyisihan laba BUMN dengan terlebih dahulu melakukan pendampingan dari Small bussiness consultant.

I. CALTEX

Dalam hal penanggulangan kemiskinan PT.Caltex telah menunjukkan komitmennya melalui bantuan baik teknis maupun permodalan kepada masyarakat. Strategi Caltex dalam kemitraan masyarakat dilakukan dengan prinsip memberi, melibatkan, berbagi, dan berpartisipasi. Intinya adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunannya. Fokus kegiatan dilaksanakan melalui pendidikan dan kesehatan yang mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal tersebut dilakukan melalui pembinaan usaha lokal. Pola pelaksanaan program melibatkan unsur dari universitas, LSM dan masyarakat luas sedangkan pola pendekatan diarahkan pada pembangunan SDM agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Tantangan yang harus dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah:

- a. perbedaan persepsi. Hal ini sangat krusial karena seringkali tuntutan masyarakat terlalu membebani perusahaan.
- b. Kondisi ekonomi perusahaan.
- c. Ketersediaan data dan informasi. Hal ini sangat penting berkaitan dengan pelaksanaan program
- d. Keterbatasan tenaga.

Usulan-usulan

Semua program penanggulangan kemiskinan harus mengarah pada Local Business development.

Dari berbagai uraian, usulan dan presentasi dari dunia usaha dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian pelaku dunia usaha sudah mempunyai upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Namun upaya-upaya dunia usaha ini perlu untuk dikoordinasikan dan sinkronkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan sektor-sektor yang lain. Pada dasarnya dunia usaha mempunyai peranan dalam mendukung pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin potensial, terutama melalui dukungan modal, bantuan aspek-aspek manajemen, pemasaran serta peningkatan keterampilan atau *skill*. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui suatu *networking* yang mengarah pada terciptanya suatu kemitraan yang terpadu, seimbang, saling menguntungkan dan bukan suatu kemitraan yang terjadi karena suatu keharusan dari pemerintah.

3. KESEKRETARIATAN KPK

Kesekretariatan KPK yang merupakan bagian dari KPK, mempunyai dua fungsi dasar. **Pertama**, sekretaris KPK sebagai kepala kesekretariatan berfungsi untuk menjalankan aspek-aspek politis (kebijakan dan diplomasi) dalam rangka diseminasi program kerja KPK. **Kedua**, pelaksanaan aspek-aspek administratif dan organisasional.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan sekretaris KPK sebagai wakil KPK selama bulan Agustus 2002 yang merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi pertama Kesekretariatan:

- a. Pada tanggal 7 Agustus 2002 Sekretaris KPK menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan Otonomi Indonesia Expo 2002.
- b. Pada tanggal 7 Agustus 2002, Sekretaris KPK mewakili KPK melakukan pertemuan dengan wakil dari BI dan Gema PKM guna membahas pengembangan keuangan mikro. Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama antara BI dan KPK.
- c. Pada tanggal 8 Agustus 2002, Sekretaris KPK menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh LP3S. Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyusun *Grand Strategy* LP3S/ISDESA. Sekeretaris KPK memanfaatkan forum pertemuan ini untuk mensosialisasikan strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan.
- d. Sekretaris KPK menjadi pembicara dengan topic Kriteria Pemingkatan (Rating) LKM/S dalam “FGD Kriteria Penilaian Kinerja & Pemingkatan Lembaga Keuangan Mikro (Syariah)”. Kegiatan ini diprakarsai oleh PT PNM dan PPE FE UGM, dan diselenggarakan pada tanggal 9 – 10 Agustus 2002 di Yogyakarta.
- e. Pada tanggal 12 Agustus 2002, Sekretaris KPK menghadiri Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota Surakarta mengenai Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- f. Pada tanggal 14 Agustus wakil dari sekretariat KPK menghadiri Rapat Gabungan (Panitia Penyelenggara, Pengarah, dan Pelaksana) Hari Perkelapaan (*Coconut Day*) 2002.
- g. Sekretaris KPK menjadi pembicara dalam acara semiloka pembangunan infrastruktur perdesaan "Posisi dan Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan", yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Agustus 2002.
- h. Pada tanggal 20 Agustus 2002, Sekretaris KPK sebagai wakil dari KPK memberikan arahan dan pedoman kepada Lembaga Pengkajian Pembangunan Perdesaan dan Lingkungan Hidup (LP3LH) dalam membentuk konsorsium LPSM di daerah untuk melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap keluarga masyarakat miskin yang memanfaatkan program.
- i. Sekretaris KPK, menjadi pembicara dalam kegiatan semiloka "Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Permodalan, Perkreditan dan Investasi pada Sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2002.
- j. Pada tanggal 24 Agustus 2002, Sekretaris KPK menghadiri Diskusi Panel "Indikator dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah", yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, BPK Perwakilan III Yogyakarta dengan dukungan dari *Partnership for Governance Reform in Indonesia*.

Guna menunjang pelaksanaan fungsi kedua, Sekretariat KPK telah diisi oleh beberapa staf yang menunjang administratif-organisatoris dari KPK. Staf-staf tersebut akan membantu koordinasi KPK yang terdiri dari staf-staf lain di forum lintas pelaku. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan dalam konteks fungsi administratif dan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan cetakan Buku Pedoman Umum KPK, dan Buku Kesepakatan Bersama KPK (mewakili Pemerintah) dengan Bank Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kesekretariatan KPK bekerjasama dengan BI sebagai koordinator pokja Lembaga Keuangan menyusun dan menerbitkan Buku Pedoman Umum Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Bantuan Teknis.
- c. Kesekretariatan KPK bekerjasama dengan Bappenas sebagai koordinator Pokja Perencanaan Makro menyusun buku mengenai "Rekapitulasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2002".

- d. Kesekretariatan KPK menerbitkan “Info KPK” dalam bentuk newsletter secara dwi mingguan. Pada Bulan Agustus 2002 terbit Info KPK edisi perdana. Ke depan, kesekretariatan KPK akan menerbitkan Buletin secara bulanan. Penerbitan Info KPK dan Buletin ini merupakan salah satu sosialisasi mengenai kebijakan, strategi, dan program-program penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh KPK.

Lampiran 1

TABEL 1
Kegiatan KPK Bulan Agustus 2002

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Agenda	Keterangan
1.	5 Agustus 2002	Pembahasan Rencana Alokasi Kredit UKM untuk Sektor Kelautan dan Perikanan dari BI.	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara BI dan KPK. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat pembahasan ini bertujuan untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama BI dan KPK, terutama untuk alokasi kredit UKM di sektor Kelautan dan Perikanan sehingga kesepakatan ini akan lebih cepat menjadi suatu aksi/upaya pengembangan UKM di tingkat bawah. Bagian dari sosialisasi kesepakatan bersama antara BI dan KPK
2.	6 Agustus 2002	Upaya sosialisasi penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan konsep dan mekanisme sosialisme penanggulangan kemiskinan, khususnya penanggulangan kemiskinan melalui <i>micro finance</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat tidak dapat menghasilkan kesepakatan mengenai konsep dan mekanisme sosialisasi penanggulangan kemiskinan melalui <i>micro finance</i>
3.	6 Agustus 2002	Usulan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali TA 2003	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2002 di Surakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> KPK memberikan arahan dan pedoman kepada daerah, agar segera membentuk KPK daerah sehingga program-program penanggulangan kemiskinan yang ada dapat disinkronisasi dan dikoordinasi. Bagian dari Pokja Asistensi Program,
4.	9 Agustus 2002	Inventarisasi potensi dan kekuatan implementasi program pengentasan kemiskinan dan pengembangan keuangan mikro di Propinsi Nanggroe Aceh darusslam	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program-program KPK ke tingkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai KPK, kesepakatan bersama antara BI dan KPK, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, serta pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan mengembangkan LKM.

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Agenda	Keterangan
5.	11 – 12 Agustus 2002	Pemantauan perkembangan program penanggulangan kemiskinan di Kab. Grobogan, Boyolali, dan Sragen	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi langsung pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, dan pembentukann KPK daerah. 	- Kegiatan ini juga dimanfaatkan KPK untuk sosialisasi KPK yang diarahkan kepada pembentukan KPK daerah.
5.	12 Agustus 2002	Memberikan konsultasi kepada Asosiasi LKM, "Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat kecil – Belu/ASDAYAMAK, Atambua, Timor - NTT	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi agenda kerja serta program-program KPK ke daerah. 	-
6.	13 Agustus 2002	Konsultasi pembentukan KPK Kabupaten Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan KPK daerah 	- KPK memfasilitasi daerah untuk membentuk KPK di tingkat daerah. Dengan KPK daerah maka program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah dan nasional akan dapat dikoordinasi dan sinkronkan sehingga mampu menciptakan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.
7.	16 Agustus 2002	Laporan Proyek: Evaluating KDP Impact Community Organization and Household Welfare	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian mengenai dampak program-program PK yang sudah ada 	- Kerjasama antara Pokja Perencanaan Makro dan Pokja Penelitian dan Pengembangan.
8.	19 Agustus 2002	Rapat koordinasi penyiapan, penyusunan, kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen <i>I-PRSP</i> 	- Penyusunan ini difasilitasi oleh TKP3KPK dengan melibatkan semua <i>stakeholder</i> .
9.	20 Agustus 2002	Permohonan arahan dalam pembentukan konsorsium LPSP di daerah guna melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap keluarga masyarakat miskin yang memanfaatkan program.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan mekanisme pendampingan dalam rangka penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan pembentukan konsorsium ini diajukan oleh Lembaga pengkajian Pembangunan Perdesaan dan Lingkungan Hidup (LP3LH). Bagian dari upaya sosialisasi, khususnya untuk bidang pendampingan.
10.	22 Agustus 2002	Kerjasama social program KPK dalam rangka penyelenggaraan Otonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dari sisi perluasan pasar dan pemasaran produk. 	- Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian koordinasi upaya-upaya penanggulangan antara KPK dengan pemerintah daerah.

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Agenda	Keterangan
		Indonesia Expo 2002.		- Kegiatan ini dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi program-program KPK.
11.	27 Agustus 2002	"Sarasehan Nasional Micro Finance dan Upaya Penanggulangan kemiskinan".	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut kesepakatan bersama antara KPK dengan BI, terutama dalam aspek pengembangan <i>micro finance</i> yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM. 	- Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan dengan penekanan pada aspek sumber daya financial.
12.	27 Agustus 2002	Presentasi laporan akhir pelaksanaan studi dampak regulasi dan instrument kebijakan daerah terhadap masyarakat miskin, pengguna layanan public, dan usaha kecil dan menengah (ASEM Trust Fund Grand for Local Regulations for Poverty Impact in Indonesia, Grant No. 028775)	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan makro nasional di Indonesia. 	- Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Bappenas yang tergabung dalam pokja Perencanaan Makro, Bank Dunia, dan Tim Macon.
13.	28 Agustus 2002	Kunjungan Menko Kesra/Ketua KPK ke lokasi PPK dan usaha mikro di Desa Pasirtalaga, Kec. Telagasari, dan Desa Lemahabang, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang, Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring langsung ke lokasi poram penanggulangan kemiskinan untuk melihat efektifitas pelaksanaan program. 	- Dengan kunjungan ini diharapkan akan ada <i>feed back</i> ke atas mengenai pelaksanaan program selama ini. Informasi yang didapat ini digunakan sebagai dasar penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan ke depan.
14.	31 Agustus 2002	Konsultasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kab. Cilacap, Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program-program KPK serta bimbingan untuk pembentukan KPK daerah 	- Dengan kegiatan ini maka diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah tidak tumpang tindih dengan program-program PK di tingkat pusat, serta sektor yang lain. Dan akhirnya akan tercapai sinkronisasi yang mendasari terbentuknya sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

